



PERTEMUAN TIONGKOK DENGAN RUSIA

Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Ketua Partai Rusia Bersatu Dmitry Medvedev, yang mengunjungi Tiongkok atas undangan CPC, di Diaoyutai State Guesthouse di Beijing, Tiongkok, Rabu (21/12).

Pasukan Keamanan Taliban Hadang Perempuan Masuk Kampus

Taliban larang perempuan Afghanistan untuk mengikuti bangku kuliah.

KABUL(IM)- Pemerintah pimpinan Taliban di Afghanistan melarang wanita mengikuti pendidikan jenjang universitas di seluruh negeri dan memberlakukan perintah tersebut dengan todongan senjata di beberapa tempat, mengabaikan kecamahan global dan menimbulkan pukulan lain terhadap separuh hak penduduknya.

"Menurut keputusan kabinet, Anda semua diinstruksikan untuk segera melaksanakan perintah penangguhan pendidikan anak perempuan sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Neda Mohammad Nadeem, seperti dikutip dari Alarabiya, Kamis (22/12).

Seorang mahasiswa di Universitas swasta Kardan di Kabul, Tamana Aref mengatakan, dia datang ke universitas sekitar pukul 7 pagi.

Anak laki-laki diizinkan masuk sedangkan perempuan

disuruh kembali ke rumah dengan sebuah todongan senjata.

"Anak laki-laki diizinkan masuk dan mereka mendorong senjata ke arah kami dan menyuruh kami pulang," kata Aref.

Harapan terakhir yang tersisa hilang dan hilang Negara ini dibawa kembali ke tahun 1990-an yang ditakuti semua orang.

Menteri Nadeem, salah satu anggota Taliban yang paling konservatif baru-baru ini mengatakan pendidikan perempuan bukanlah tradisi Afghanistan, melainkan bagian dari budaya Barat yang dibawa ke negara itu selama kehadiran pasukan Amerika Serikat.

Pernyataan itu mengabaikan peran perempuan selama sebagian besar abad ke-20 di Afghanistan, membantu menyusun konstitusi negara, memenangkan hak untuk memilih, dan menjalankan bisnis.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengkritik keputusan tersebut dan mengatakan hal itu akan semakin memundurkan upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan.

Bahkan pemerintah negara tetangga Pakistan, yang memiliki hubungan dekat dengan Taliban, mengatakan kecewa mengetahui tentang penangguhan universitas dan pendidikan tinggi bagi mahasiswa di Afghanistan.

"Kami sangat mendesak pihak berwenang Afghanistan

untuk meninjau kembali keputusan ini," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Taliban melarang sebagian besar anak perempuan pergi ke sekolah ketika mereka merebut kekuasaan pada 2021 ketika pasukan Amerika Serikat mundur.

Akhir tahun lalu, mereka memberhentikan ribuan perempuan Afghanistan dari pekerjaan pemerintah dan mencegah mereka bepergian sendiri kecuali ditemani kerabat laki-laki. Wanita juga kembali diharuskan mengenakan burqa dari ujung kepala hingga ujung kaki di depan umum.

Langkah Taliban untuk membatasi perempuan dari bekerja dapat merugikan ekonomi Afghanistan hingga 1 miliar dolar per tahun, atau 5 persen dari produk domestik bruto, menurut Program Pembangunan PBB.

Selain itu, merampas 3 juta gadis remaja dari pendidikan menengah akan menelan biaya setidaknya 500 juta dolar per tahun di Afghanistan, menurut UNICEF.

Perempuan juga dilarang melakukan praktik hukum

atau melayani sebagai hakim, jaksa, atau pengacara pembela. Dari hampir 300 hakim perempuan di Afghanistan sebelum pengambilalihan, 244 telah dievakuasi dari negara tersebut.

Sudah hancur oleh puluhan tahun perang dan kekacauan politik, prospek Afghanistan hanya menurun sejak pengambilalihan Taliban.

Sebuah laporan Bank Dunia yang dikeluarkan bulan lalu menggambarkan "gambaran suram kondisi kehidupan di Afghanistan" karena kekurangan yang meluas berlanjut dan kerawanan pangan tetap tinggi, berdampak negatif terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan.

Dua pertiga penduduk negara itu berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan non-pangan, menurut laporan itu, situasi yang diperburuk oleh kekeringan dan kenaikan harga pangan global di tengah perang Rusia di Ukraina.

Selain itu, 65 persen dari mereka yang disurvei mengatakan kondisi ekonomi mereka akan memburuk di tahun mendatang. **tom**

DK PBB Rilis Resolusi untuk Akhiri Kekerasan di Myanmar

NEW YORK (IM) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadopsi resolusi pertama untuk Myanmar dalam 74 tahun pada Rabu (21/12). Resolusi ini menuntun diakhirinya kekerasan

"Hari ini kami telah mengirim pesan tegas kepada militer bahwa mereka tidak boleh ragu, kami berharap resolusi ini dilaksanakan secara penuh," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward setelah pemungutan suara pada resolusi yang dirancang negaranya itu.

"Kami juga telah mengirim pesan yang jelas kepada rakyat Myanmar bahwa kami mencari kemajuan sesuai dengan hak, keinginan, dan kepentingan mereka," kata Woodward kepada dewan beranggotakan 15 perwakilan negara itu.

Myanmar berada dalam krisis sejak tentara mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Suu Kyi dan pejabat lainnya ditahan, sehingga memicu protes besar yang ditanggapi dengan tindakan kekerasan oleh junta.

Negosiasi rancangan resolusi DK PBB tentang Myanmar ini dimulai pada September. Teks awal yang dilihat oleh Reuters mendesak diakhirinya transfer senjata ke Myanmar dan mengancam sanksi, tetapi bahasa itu telah dihapus.

Resolusi yang diadopsi hanya mengungkapkan keprihatinan yang mendalam pada keadaan darurat yang terus berlanjut yang diberlakukan oleh militer ketika merebut kekuasaan dan dampak serius terhadap rakyat Myanmar.

Dalam teks yang disetujui, DK PBB mendesak tindakan konkret dan segera untuk mengimplementasikan rencana perdamaian yang disetujui oleh Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

DK PBB juga mengeluarkan seruan untuk menjunjung tinggi institusi dan proses demokrasi.

"Untuk mengajari dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif sesuai dengan keinginan dan kepentingan negara dan warga," ujar resolusi tersebut.

Duta Besar Myanmar untuk PBB yang mewakili pemerintah Suu Kyi, Kyaw Moe Tun, mengatakan meskipun ada

elemen positif dalam resolusi tersebut, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) akan lebih memilih teks yang lebih kuat. "Kami jelas ini hanya langkah pertama," katanya.

"Pemerintah Persatuan Nasional meminta DK PBB (untuk membangun) resolusi ini untuk mengambil tindakan lebih lanjut dan lebih kuat untuk memastikan berakhirnya junta militer dan kejahatannya," ujarnya.

Kelahiran resolusi DK PBB terbaru ini merupakan kesepakatan yang sudah lama terpecah dalam menangani krisis Myanmar. Cina, Rusia, dan India menentang resolusi tersebut dengan abstain dan pemungutan suara pada Rabu. Sedangkan sebanyak 12 anggota yang tersisa memberikan suara mendukung.

"Tiongkok masih memiliki kekhawatiran," kata Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun kepada DK PBB setelah pemungutan suara.

"Tidak ada solusi cepat untuk masalah ini. Apakah itu dapat diselesaikan dengan benar atau tidak pada akhirnya, tergantung pada dasarnya, dan hanya, pada Myanmar sendiri," ujarnya menjelaskan Beijing ingin DK PBB mengadopsi pernyataan resmi tentang Naypyidaw, bukan melahirkan sebuah resolusi.

Sedangkan Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya mengatakan, negaranya tidak memandang situasi di Myanmar sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Berangkat dari penilaian itu, Moskow percaya hal itu tidak boleh ditangani oleh DK PBB.

Sampai saat ini DK PBB hanya menyetujui pernyataan resmi tentang Myanmar, dengan tentara yang memimpin tindakan keras terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Amerika Serikat menilai upaya tersebut sebagai genosida, meski Myanmar membantahnya dan melakukan tindakan yang sah terhadap pemberontak yang menyerang pos polisi.

Satu-satunya resolusi lain yang diadopsi oleh DK PBB tentang Myanmar adalah pada 1948. Ketika itu badan tersebut merekomendasikan Majelis Umum PBB untuk mengakui Myanmar, yang kemudian berubah nama menjadi Burma dan kembali ke nama semula, sebagai anggota badan dunia tersebut. **gul**

Pemerintahan Baru Israel telah Terbentuk

YERUSALEM (IM)- Perdana Menteri terpilih Benjamin Netanyahu pada Kamis (22/12) malam mengumumkan bahwa dia telah berhasil membentuk koalisi baru. Netanyahu menyampaikan pengumuman itu melalui panggilan telepon ke Presiden Isaac Herzog sebelum batas waktu tengah malam. Partai Likud merilis video singkat Netanyahu yang tersenyum dan rekaman percakapan tersebut.

"Saya ingin mengumumkan kepada Anda bahwa berkat dukungan publik yang luar biasa yang kami terima dalam pemilu, saya telah berhasil membentuk pemerintahan yang akan menjaga semua warga Israel," kata Netanyahu.

Netanyahu berhasil membentuk pemerintahan setelah negosiasi yang alot selama berminggu-minggu negosiasi dengan para mitranya. Netanyahu masih harus menyelesaikan kesepakatan pembagian kekuasaan dengan Partai Likud. Kendati demikian, Netanyahu mengatakan, kesepakatan pembagian kekuasaan akan rampung pada pekan depan. Namun hingga kini tanggal pengembalian sumpah jabatan Netanyahu belum diumumkan.

koalisi yang didominasi oleh mitra sayap kanan dan ultra-Ortodoks yang mendorong perubahan dramatis dan dapat mengasingkan sebagian besar masyarakat Israel. Hal ini meningkatkan risiko konflik dengan Palestina dan menempatkan Israel pada jalur konflik dengan beberapa sekutu terdekatnya termasuk Amerika Serikat dan komunitas Yahudi Amerika.

Netanyahu telah mencapai kesepakatan dengan beberapa tokoh paling kontroversial dalam politik Israel. Salah satunya Itamar Ben-Gvir, yang pernah dihukum karena menghasut rasisme dan mendukung organisasi teroris. Netanyahu mengangkat Ben-Gvir menjadi menteri keamanan yang akan menempatkannya sebagai penanggung jawab kepolisian nasional.

Tokoh kontroversial lainnya yang masuk ke dalam jajaran kabinet Netanyahu adalah Bezalel Smotrich. Dia merupakan seorang pemimpin pemukim Tepi Barat yang percaya bahwa Israel harus mencaplok wilayah Palestina yang diduduki. Smotrich menjabat sebagai menteri keuangan dan memegang otoritas luas atas pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Tokoh sayap kanan lainnya yaitu Avi Maoz. Dia adalah kepala faksi kecil agama anti-LGBTQ. Maoz dipercaya untuk mengatur sistem pendidikan nasional Israel

dan wakil menteri yang bertanggung jawab atas "identitas Yahudi". Maoz secara terbuka memusuhi aliran Yudaisme liberal yang populer di Amerika Serikat.

Dalam pemilihan 1 November, Netanyahu dan sekutunya merebut mayoritas 64 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang. Netanyahu berjanji untuk segera membentuk koalisi. Tetapi proses membentuk koalisi itu tidak mudah, karena kelompok ultra-Ortodoks dan sayap kanan menuntut jaminan tegas atas ruang lingkup kekuasaan mereka. Sebelum pemerintah baru mengambil sumpah, Netanyahu mendorong parlemen meloloskan undang-undang baru yang diperlukan untuk memperluas otoritas Ben-Gvir, dan menciptakan posisi menteri baru yang memberikan kekuasaan kepada Smotrich di Tepi Barat. Pada masa lalu, posisi ini dipegang oleh menteri pertahanan.

Parlemen juga akan menyetujui undang-undang yang memungkinkan Aryeh Deri menjabat sebagai menteri pemerintah meski sedang menjalani masa percobaan hukuman atas pelanggaran pajak. Deri merupakan seorang politisi veteran yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus suap.

Sementara itu, kelompok ultra-Ortodoks menginginkan peningkatan subsidi untuk sistem pendidikan otonom mereka. Hal ini telah menuai kritik karena mereka berfokus pada studi agama dan memberikan sedikit keterampilan kepada siswanya untuk dunia kerja. Sedangkan anggota parlemen Likud telah bersaing untuk mendapatkan koleksi penugasan yang berkurang, setelah Netanyahu membenarkan banyak pekerjaan penting kepada mitra pemerintahannya.

Netanyahu telah diadili atas dugaan korupsi. Dia sangat ingin kembali menjabat sebagai perdana menteri setelah satu setengah tahun terakhir sebagai pemimpin oposisi. Dia dan mitranya diharapkan mendorong serangkaian undang-undang yang mengguguncang peradilan negara dan berpotensi membebaskan Netanyahu dari tuduhan apa pun.

Netanyahu adalah perdana menteri terlama Israel, dengan total masa jabatan 15 tahun sebelum dia digulingkan tahun lalu. Pemerintah sayap kanan yang dibentuk Netanyahu telah menjadi sorotan dari pejabat Palestina, serta Amerika Serikat. Mereka khawatir, pemerintahan baru Netanyahu akan meningkatkan eskalasi antara warga Palestina dan pemukim Yahudi. **gul**

74 Tahanan Palestina Meninggal Karena Kelalaian Medis

TEL AVIV (IM)-Tujuh puluh empat tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel telah meninggal akibat kelalaian medis sejak 1967. Tahanan pertama yang meninggal adalah Khalil Al-Rashaideh dari Belchem pada 1968 akibat serangan jantung. Dia tidak diberikan perawatan yang diperlukan.

Tahanan Palestina terbaru yang meninggal dunia adalah Nasser Abu Hamid, dari kamp Al-Amari pada Rabu (21/12). Dia dinyatakan meninggal karena kanker paru-paru. Layanan penjara Israel tidak membenarkan akses pengobatan kepada Abu Hamid. Pengadilan pendudukan Israel menolak permintaan pembebasan dini karena kesehatannya yang memburuk.

Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, pada Rabu mengatakan, jenazah Abu Hamid tidak akan dibebaskan untuk dimakamkan. Kantor Gantz mengatakan jenazah Abu Hamid, yang merupakan salah satu pendiri Brigade Syuhada Al Aqsa, akan ditahan sebagai alat tawar-menawar untuk kembalinya tahanan Israel dan jenazah tentara yang ditahan oleh kelompok militan Hamas di Gaza.

Abu Hamid (50) adalah man-

tan pemimpin sayap bersenjata faksi Fatah. Dia telah menjalani hukuman seumur hidup sejak tahun 2002 setelah dinyatakan bersalah atas kematian tujuh orang Israel selama infitad kedua Palestina, atau pemberontakan melawan pendudukan Israel di awal tahun 2000-an.

Orang-orang Palestina berbaris dan menuntut toko-toko di Tepi Barat pada Selasa untuk memprotes kematian Abu Hamid.

Israel sering menaruh jenazah warga Palestina yang meninggal dunia dan diduga melakukan serangan. Israel mengatakan kebijakan itu berfungsi sebagai pencegah serangan di masa depan dan alat untuk pertukaran tahanan. Sementara kelompok hak asasi mengatakan, tindakan Israel itu adalah bentuk hukuman kolektif yang dijatuhkan pada keluarga yang berduka.

Hamas telah menahan dua tahanan Israel dan jasad dua tentara Israel yang tewas selama perang Gaza 2014. Keluarga keempat orang Israel itu bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan pada Rabu (21/12).

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, dalam pette-

muan itu, Fransiskus menyatakan solidaritas yang mendalam dengan keluarga.

Dalam beberapa bulan terakhir, pejabat Palestina menyerukan pembebasan Abu Hamid karena kesehatannya memburuk. Pada Selasa, para pejabat Palestina menyalahkan Israel atas kematian Abu Hamid. Gantz membantah tuduhan bahwa Israel terlibat dalam kematian Abu Hamid.

Dilaporkan Middle East Monitor, Rabu, menurut Palestinian Prisoners' Club sekitar 600 tahanan yang mengalami sakit masih ditahan di penjara pendudukan Israel.

Dari jumlah tersebut, terdapat 200 narapidana yang menderita penyakit kronis, dan 24 di antaranya menderita tumor dan kanker dalam berbagai stadium.

Seorang narapidana, Saadia Farajallah (68 tahun) meninggal pada Juli akibat kelalaian medis yang diabaikan. Dia menderita diabetes, hipertensi, dan masalah jantung. Dia muncul di pengadilan dengan kursi roda beberapa hari sebelum kematiannya, karena kesehatannya yang memburuk. **ans**

Korsel Berjanji Dorong Pertumbuhan Ekonomi

SEOUL(IM)-Pemerintah Korea Selatan (Korsel) berjanji mendukung kebijakan dan melakukan deregulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi Negeri Ginseng tahun depan diperkirakan lebih cepat dibandingkan prediksi sebelumnya.

Pemerintah Korsel memprediksi pada 2023 perekonomian terbesar keempat di Asia itu akan melambat 1,6 persen dari perkiraan 2,5 persen tahun ini. Lebih pesimistis dibandingkan perkiraan bank sentral pada November lalu yang sekitar 1,7 persen.

Dalam konferensi pers Kamis (22/12) Menteri Keuangan Choo Kyung-ho mengatakan penurunan perkiraan pertumbuhan ini berdasarkan membu-

ruknja outlook ekonomi global. Pemerintah Korsel berjanji menurunkan pajak dan melonggarkan regulasi pada sektor properti untuk memastikan pinjaman lunak.

Presiden Yoon Suk-yeol memerintahkan menteri-menterinya untuk mendorong reformasi di bidang-bidang penting. Terutama praktik pengelolaan pekerja di negara yang memiliki catatan panjang hubungan industri yang rapuh.

Pemerintah juga mengatakan akan mengeluarkan kebijakan dan bantuan finansial untuk mendorong ekspor. Tahun depan diprediksi penjualan ke luar negeri turun dari 6,6 persen pada tahun ini menjadi 4,5 persen. **ans**

Gambia Tuntut Perusahaan Sirup Obat Batuk India Atas Kematian 70 Anak-anak

GAMBIA(IM) - Sebuah komite parlemen di Gambia telah merekomendasikan penuntutan terhadap produsen sirup obat batuk di India yang diduga menyebabkan kematian sedikitnya 70 anak di negara tersebut.

Komite menegaskan Maiden Pharmaceuticals harus diminta pertanggungjawaban karena mengeksport apa yang disebutnya sebagai obat yang terkontaminasi. Seperti diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan peringatan pada Oktober lalu yang menyarankan regulator untuk menghentikan penjualan sirup.

Namun laboratorium pemerintah di India mengatakan tes mereka pada sirup menemukan bahwa mereka "memenuhi spesifikasi". Seorang pejabat India mengatakan pekan lalu bahwa WHO "lancang" karena telah menyalahkan sirup sebagai pemicu kematian anak-anak itu.

Tetapi badan kesehatan global itu mengatakan kepada BBC bahwa mereka hanya mengikuti mandatnya dan "bertahan pada tindakan yang diambil".

Setelah penyelidikan yang dilakukan selama berminggu-minggu, komite parlemen Gambia sekarang merekomendasikan agar pihak berwenang mengambil tindakan keras, termasuk melarang semua produk Farmasi Maiden di negara itu dan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan tersebut.

"Panitia mengatakan yakin bahwa Maiden Pharmaceuticals bersalah dan harus bertanggung jawab untuk mengeksport obat-obatan yang terkontaminasi," terang parlemen dalam laporannya.

"Temuan tetap sama dengan laporan sebelumnya yang menunjukkan Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup dan Magrip N Cold Syrup terkontaminasi dengan diethylene glycol dan ethylene glycol," lanjutnya.

Diethylene glycol dan ethylene glycol beracun bagi manusia dan bisa berakibat fatal jika dikonsumsi. Namun panel tersebut menambahkan bahwa penyebab ilmiah yang pasti dari kematian anak-anak tersebut masih dalam penyelidikan.

Panel juga mengingatkan Badan Pengawasan Obat negara untuk memastikan semua obat yang diimpor ke negara itu terdaftar dengan benar dan pemeriksaan latar belakang dilakukan pada produsen - termasuk mengunjungi fasilitas mereka.

Laporan tersebut juga mengungkapkan sistem perawatan kesehatan negara yang tidak cukup baik sehingga mendesak pemerintah untuk memperkuatnya dan menyediakan peralatan dan obat-obatan yang lebih baik ke rumah sakit negara.

Menanggapi hal ini, Maiden Pharmaceuticals langsung membantah tuduhan itu. **gul**



PEMBUKAAN KONJEN TIONGKOK DI BANDAR ABBAS - IRAN

Duta Besar Tiongkok untuk Iran Chang Hua (paling kanan) dan Wakil Gubernur Provinsi Hormuzgan Adel Shahrzad (kedua kanan) menghadiri pembukaan Konsulat Jenderal Tiongkok di Bandar Abbas, Iran, Rabu (21/12). Konjen Tiongkok di Bandar Abbas resmi dibuka di Hormuzgan di pantai selatan Iran, menandai pendirian konsulat jenderal pertama Tiongkok di Iran.